

# PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Oleh : Anshari, Efrizal Syofyan

## *Abstract*

*The purpose of this research is to find out the influence of asset management of Government of Padang, its impact on quality of financial report of the Government of Padang. The conclusion are Inventory of assets, legal audit assessment of assets and supervision have positively and significant impact on the quality of financial report of the Government of Padang.*

**Keyword:** *assets management, inventory, legal audit, assessment, controlling, quality of financial report.*

## **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menggariskan, wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan

sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu : (a) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang relevan, antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap (b) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang andal, antara lain : penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas (c) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dibandingkan (d) Laporan keuangan harus mempunyai informasi yang dapat dipahami.

Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, yaitu adanya kecenderungan kualitas laporan keuangan yang semakin memburuk. Terlihat dengan adanya penurunan untuk opini yang baik yaitu “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” sementara itu justru ada peningkatan untuk opini yang tidak baik, yaitu “Tidak Wajar (TW)”. Hal tersebut juga berarti laporan keuangan yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam pengambilan keputusan semakin sedikit (kecenderungan menurun). Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan semakin banyak (kecenderungan naik).

Menurut Sutaryo (2010) menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang dalam lima

Tahun Anggaran terakhir, Pemerintah Kota Padang memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua pihak; seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pemeriksaan BPK terhadap**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Kota**  
**Padang dalam Lima Tahun Anggaran**  
**2007 s.d 2011**

No	Tahun	Opini
1.	2007	Tidak Menyatakan Pendapat <i>(Disclaimer Opinion)</i>
2.	2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota

Padang belum pernah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini antara lain terjadi karena Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang belum tertib. Seperti salah satu contoh yang terjadi pada Tahun 2007 yaitu nilai Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.659.235.754.149,62 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat berdasarkan prosedur akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Siregar (2004:518) kegiatan pengelolaan barang milik daerah terdiri dari lima tahapan yaitu :

1. Inventarisasi aset;
2. Legal audit;
3. Penilaian aset;
4. Pengendalian dan pengawasan.

Untuk mengetahui keterkaitan pengelolaan barang daerah yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

**“PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN**

**KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG “.**

## **2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan informasi yang berkualitas. Menurut Salamun (2007) dalam Halim (2007:97) laporan keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai.

Bastian (2005) dalam Darmansyah (2005:33) mengatakan, diperlukan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Menurut Anwar Nasution dalam Majalah Akuntan Indonesia (2008) Pengelolaan aset barang milik negara dan tanah yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih kurang tertib. Hal ini terlihat dari pencacatan dan bukti hak aset-aset tersebut. “Kurang tertibnya pencatatan berdampak pada kewajaran pelaporan aset dalam laporan keuangan. Rawan terhadap penyalahgunaan, dan rawan pengakuan aset oleh pihak lain yang kemudian menjadi sengketa.

Menurut Ningsih (2002) menyatakan bahwa semakin baik inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerinan daerah. Menurut Cris Kuntadi dalam Majalah Ikatan Indonesia (2008) menyatakan bahwa Pemda juga harus serius mengelola aset dengan mempelajari manajemen aset. Apalagi, manajemen aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap

tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan, serta terungkap dan memadai sesuai dengan undang-undang.

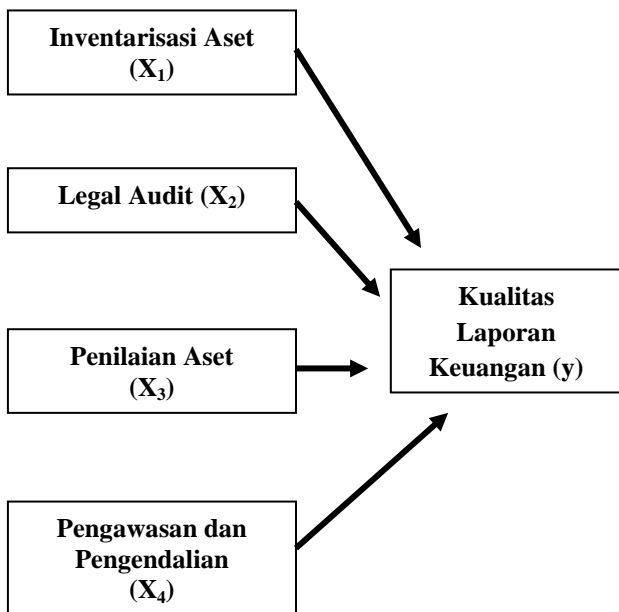
Pengelolaan barang milik daerah adalah bagian dari suatu sistem, yakni sistem akuntansi yang merupakan dari sistem informasi manajemen. Menurut S.P. Hariningsih (2006:2) sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam organisasi. Sejalan dengan pengertian tersebut, pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan barang milik daerah disuatu wilayah. Jika penyajian informasi dalam pengelolaan barang milik daerah tersebut memadai, maka informasi tersebut berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wilkinson et.al. (2000:18) yakni bahwa informasi yang berkualitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Diperkuat dengan pendapat M.Yusuf (2010:8) yakni pengelolaan aset daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik.

Menurut Siregar (2004:518), pengelolaan aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan

aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola barang milik daerah. Pengelolaan aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- a. Inventarisasi aset;
- b. Legal audit;
- c. Penilaian aset;
- d. Pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat ditetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

2. Legal audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.
3. Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.
4. Pengawasan dan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	20.349	8.074	2.520	.016
Inventarisasi BMD (X1)	.446	.113	3.945	.000
Legal Audit (X2)	.178	.325	2.148	.046
Penilaian BMD (X3)	.379	.263	2.442	.038
Pengawasan dan Pengendalian (X4)	.506	.129	3.935	.000

F hitung = 26.152, sig : 0.000  
 R = 0.863  
 R<sup>2</sup> = 0.744 Adjusted R<sup>2</sup> = 0.716

### 3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), legal audit, penilaian Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

Penelitian ini bersifat kausatif (sebab akibat) yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkapkan fakta lebih mendalam mengenai pengaruh inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), legal audit, penilaian Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), dan pengawasan serta pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Kerja/SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari 45 Unit Kerja/SKPD. Setiap SKPD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban

untuk menyiapkan Neraca, LRA, dan CaLK.

Dalam penelitian ini sampel di dalam mengambil Populasi sampel dengan menggunakan teknik *Simpel Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan kelompok (Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Sekretariat Daerah). Jumlah sampel sebanyak 41 SKPD.

Analisa statistik yang digunakan adalah Analisa Regresi Berganda (Sugiono, 2003 : 211). Rumusan regresinya adalah :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Dimana :

$Y$  = Kualitas Laporan Keuangan

$X_1$  = Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

$X_2$  = Legal Audit

$X_3$  = Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)

$X_4$  = Pengawasan dan Pengendalian

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2, b_3,$  dan  $b_4$  = Koefesien regresi

$e$  = Tingkat kesalahan

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diperoleh hasil menggunakan *multiple regression analysis* seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std.Error		
(Constant)	20.349	8.074	2.520	.016
Inventarisasi BMD (X1)	.446	.113	3.945	.000
Legal Audit (X2)	.178	.325	2.148	.046
Penilaian BMD (X3)	.379	.263	2.442	.038
Pengawasan dan Pengendalian (X4)	.506	.129	3.935	.000
F hitung = 26.152, sig : 0.000 R = 0.863 R <sup>2</sup> = 0.744 Adjusted R <sup>2</sup> = 0.716				

Berdasarkan Tabel 4.13 maka dapat dibuat persamaan yaitu:

$$Y = 20.349 + 0.446X_1 + 0.178X_2 + 0.379X_3 + 0.506X_4$$

Nilai konstanta sebesar 20.349 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sangat ditentukan oleh inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal

Audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) dan pengendalian dan pengawasan. Nilai R (koefisien regresi) adalah sebesar 0.863. Nilai R berada dalam kisaran antara (-1) dan 1, sehingga nilai sebesar 0.863 termasuk mempunyai korelasi yang erat karena berada dalam kisaran tersebut. Nilai R<sup>2</sup> (R square) sebesar 0.744 dengan *Adjusted Rsquare* adalah sebesar 0.716 atau 71,60%, memberi makna bahwa pengaruh variable lain terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 71,60%.

Koefisien regresi inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.446. Berarti peningkatan setiap inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.446 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

Koefisien regresi legal audit menunjukkan hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.178. Berarti peningkatan legal audit maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.178 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila legal audit ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

Koefisien regresi penilaian Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.379. Berarti peningkatan setiap penilaian Barang Milik Daerah maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.379 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila penilaian Barang Milik Daerah ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

Koefisien regresi pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan hubungan

positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.506. Berarti peningkatan setiap pengendalian dan pengawasan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.506 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila pengendalian dan pengawasan ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

## **4.2 Pembahasan**

### **a. Pengaruh Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Padang.**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang ada pada pemerintah Kota Padang, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang.



Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien regresi inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 0.405. Berarti peningkatan setiap inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang sebesar 0.405 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ningsih (2002) yang menyatakan bahwa semakin baik inventarisasi Barang Milik Daerah maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Kutandi (2008) pemerintah daerah juga harus serius mengelola asset. Apalagi asset terkait dengan bagaimana cara mengelola aktiva tetap, agar aktiva tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis deskriptif, maka dapat diungkapkan bahwa indikator inventarisasi Barang Milik Daerah yang paling tinggi adalah pencatatan. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 4,39 dengan tingkat capaian

responden sebesar 87.77. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan Barang Milik Daerah masuk kedalam kategori Baik. Sedangkan indikator yang paling rendah nilainya adalah pelaporan hasil. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 4.29 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) Sebesar 84.68. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pelaporan hasil masuk kedalam kategori baik.

Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD).

#### **b. Pengaruh Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Padang.**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa legal audit mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap legal audit yang ada pada pemerintah Kota Padang, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang.

Koefisien regresi legal audit menunjukkan hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.178. Berarti peningkatan legal audit maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.178 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila legal audit ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Porter (2003:90) yang menyatakan bahwa konsep auditing, legal audit berhubungan dengan independensi, kompetensi dan kode etik auditor agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur sesuai dengan criteria yang ditetapkan. Semakin baik pelaksanaan legal audit maka informasi dalam laporan keuangan akan semakin berkualitas dan dapat dipercaya.

Legal audit memiliki rata-rata skor sebesar 4.30 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 86.06. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan legal audit pada SKPD yang ada di Kota Padang masuk kedalam kriteria Baik.

Berdasarkan analisis deskriptif, maka dapat diungkapkan bahwa indikator penguasaan Barang Milik Daerah memiliki rata-rata skor paling tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 4,40 dengan tingkat capaian responden sebesar 88.05. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan Barang Milik Daerah masuk kedalam kategori Baik.

Indikator identifikasi permasalahan legal Barang Milik Daerah memiliki rata-rata skor sebesar 4.20 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) Sebesar 84.07. Hal ini menunjukkan bahwa indikator identifikasi permasalahan legal Barang Milik Daerah yang ada pada Pemerintah Kota Padang masuk kedalam kategori baik.

Legal audit merupakan sebuah mekanisme dari suatu verifikasi yang kompleks terhadap keberadaan suatu subjek hukum berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya secara objektif dan

sistematis berdasarkan sistem hukum nasional yang berlaku (Yulfasni, 2005). Legal audit merupakan pemeriksaan ke dalam perusahaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum. Legal audit dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya kebiasaan umum dari para pelaku bisnis dan individu sebagai usaha tindakan hukum, untuk menyelesaikan suatu sengketa sehingga dapat menghindari borosnya biaya dan proses pengadilan yang berbelat-belat, dengan menggunakan beberapa konsep atau teknik penanganan pencegahan.

### **c. Pengaruh Penilaian BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Padang.**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa penilaian BMD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Artinya apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian Barang Milik Daerah pada pemerintah Kota Padang, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Padang.

Koefisien regresi pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) menunjukkan hubungan positif

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang dengan nilai sebesar 0.506. Berarti peningkatan setiap pengendalian dan pengawasan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang sebesar 0.506 satuan (asumsi ceteris paribus). Dengan demikian apabila pengendalian dan pengawasan ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Siregar (2004:50) yang menyatakan bahwa penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Penilaian aset yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan *outsourcing* kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

Hasil analisis deskriptif tanggapan responden tentang penilaian Barang Milik Daerah memiliki rata-rata skor sebesar 3.99 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar

79.74. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kota Padang masuk kedalam kriteria Cukup. Artinya pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator penilaian Barang Milik Daerah sudah dilakukan secara objektif dan transparan, profesional dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelemahan dalam penilaian Barang Milik Daerah (BMD) adalah jumlah dan kuantitas sumber daya manusia penilai Barang Milik Daerah yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu sisi penting penilaian khusus untuk Barang Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 tahun 2008 tentang Penilaian BMN, adalah bahwa penilaian berfungsi untuk membantu penyajian neraca pemerintah pusat. Disinilah kita mendapati keterkaitan erat antara penilaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Mencermati SAP, akan diperoleh gambaran tentang di mana saja peran penilaian ini dibutuhkan. Bagaimana dengan Pemerintah Daerah yang tidak memiliki tenaga ahli penilai dan/atau aturan tentang penilaian sehingga harus mengantungkan diri

dengan Penilai Independen dampaknya adalah menguras APBD untuk membiayai tenaga ahli dimaksud. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah memasuki babak baru pada tahun 2003 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Paket payung hukum reformasi keuangan Daerah semakin lengkap setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarayang telah mendapat persetujuan DPR dan pengesahan oleh Presiden. Selanjutnya atas tiga paket undang-undang tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Reformasi pengelolaan keuangan Daerah ini sesungguhnya memiliki dimensi yang begitu luas. Di antara dimensi strategis yang menjadi karakter reformasi tersebut adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini ditatausahakan dan dipertanggungjawabkan. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut

mengatur bahwa pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**d. Pengaruh Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Padang.**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa Pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Artinya apabila dilakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada pada pemerintah Kota Padang, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien regresi optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 0.635. Berarti peningkatan setiap Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang sebesar 0.635 satuan (asumsi

ceteris paribus). Dengan demikian apabila optimalisasi atau pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) ditingkatkan maka kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang akan semakin meningkat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Susilo Martoyo (1988:122) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, nilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan atau tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan atau sesuai rencana sebagainya dan hal ini akan menjadikan kualitas pekerjaan tetap terkontrol dengan baik.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa apabila pengawasan semakin baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sebaliknya apabila pengawasan lemah akan menimbulkan kesalahan-kesalahan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Bab I, pasal 1 (4) menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis deskriptif jawaban responden tentang pengendalian dan pengawasan sebesar 3.90 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 77.97. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan pada Pemerintah Kota Padang masuk kedalam kriteria Cukup. Artinya pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pada Pemerintah Kota Padang belum sesuai dengan yang diharapkan. Indikator penentuan standar kerja memiliki rata-rata skor paling tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 3.96 dengan Tingkat Capaian Responden (TCR) sebesar 79.27. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan standar kerja atas pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah masuk kedalam kategori cukup. Artinya dalam melakukan standar kerja masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Sedangkan indikator koreksi terhadap penyimpangan memiliki rata-rata skor paling rendah yaitu sebesar 3.77 dengan Tingkat Capaian Responden

(TCR) Sebesar 75.45. Hal ini menunjukkan bahwa indikator koreksi terhadap penyimpangan pada Pemerintah Kota Padang masuk kedalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan belum dilaksanakan secara baik.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Dengan kata lain keberhasilan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan dan kemasyarakatan dapat ditentukan oleh berhasil tidaknya pengawas dalam melaksanakan tugasnya karena hasil pengawasan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terwujudnya strategi kinerja pengawasan dilingkungan pemerintah.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan

*good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Bab I, pasal 1 (4) menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

a. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Artinya semakin baik inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang.

b. Legal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Artinya semakin bagus legal audit maka kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang juga akan semakin baik.

c. Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Artinya semakin bagus penilaian Barang Milik Daerah maka kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang juga akan semakin baik.

d. Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Artinya semakin baik inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

a. Penelitian ini memiliki sampel penelitian yang terbatas yaitu sebanyak 41 SKPD sehingga hasilnya belum dapat digeneralisir

- pada jumlah sampel yang lebih besar.
- b. Penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
  - c. Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan cukup banyak, sedangkan penelitian ini hanya melihat pengaruh pengelolaan Barang Milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang, maka disarankan kepada pengelola anggaran dan Barang Milik Daerah untuk :

- a. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penentuan standar kerja yang lebih baik atas pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah, melakukan bimbingan terhadap

pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, serta melakukan teguran ataupun perbaikan secara langsung apabila ada penyimpangan.

- b. Meningkatkan penilaian Barang Milik Daerah, dengan cara meningkatkan jumlah dan kuantitas sumber daya manusia penilai Barang Milik Daerah dan juga memperbaiki metode dalam melakukan penilaian asset.

### Daftar Pustaka

- Abdul Halim, (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat;
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi, Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Daerah* Jogjakarta: Penerbit UPP STIM YPKN;
- Agoes, Sukrisno. 2008. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan. Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arent, Alvin A, and James K Loebbacke, (2000). *Auditing An Integrited Approach*, 8Th Ed, London : Prentice Hall Internationa;
- Awami Asad, (2007). *Transparansi Akuntabilitas Keuangan Daerah : ‘Mati Angin’ Buat Korupsi* (Online),



- (<http://google.com>) (diakses 02 Januari 2012);
- Burhanudin, (2009), *Manajemen Aset Daerah, Edisi Pertama*. Bogor, Pusdiklatwas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Chabib Soleh, Heru Rochmansyah (2010), *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Edisi Kedua, Juli 2010, Penerbit Fokus Media Bandung;
- Darmansyah, (2005) *Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Otonomi Daerah; evaluasi & proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa-Partnership, Jakarta;
- Doli Siregar, (2004), *Manajemen Aset*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Guritno, (1993), *Kamus Ekonomi*, Yogyakarta: UGM Press;
- Idris, (2008), *Aplikasi Model Analisis Kuantitatif dengan SPSS*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2008, *Manajemen Aset, Majalah Ikatan Akuntan Indonesia*. Edisi Nomor 13/tahun II/Desember 2008;
- Laksanto Utomo, (2008), *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*, Bandung : PT Alumni;
- Mahmudi, (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN., Yogyakarta;
- Manullang, (1995) *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia;
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI;
- Muhammad Yusuf, (2010), "*Sistem Informasi Akuntansi IP*". Jakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana;
- M. Yusuf, (2010) *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Terbaik*, Penerbit Salemba Empa;
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat*. Jakarta : Salemba Empat;
- Nyemas Hasfi.(2012). *Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (suatu studi pada pemerintah Kabupaten Sintang)*. Tesis. Magister Ilmu Sosial Politik. Universitas Tanjung Pura.
- Potter (2003) *Accounting Earnings Announcement*. *Jurnal of Accounting Research*, Vol. 30. No 1.P. 146
- Robert Tampubolon. 2005. *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta. Penerbit: PT Elex Media Komputindo;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- Sarundajang, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sonny Sumarsono. 2010 *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta : Graha. Ilmu;
- Sudjana, ( 1999) *Metode Penelitian*, Bandung Rineka Cipta;
- Susilo Martoyo (1988) “*Pengetahuan Dasar Manajemen*”, BPF, Yogyakarta.
- Sutaryo, Paper Manajemen Aset Daerah tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintah
- S.P. Hariningsih, (2006), *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit ARDANA MEDIA.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- Wilkinson.J.W., Cerullo.M.J., Raval.V., dan Won-on-wing.B., 2000, “*Accounting Information Systems*, 4th Edition, 3-26.
- Willy Yanti Ningsih.(2012). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Kewajaran Informasi Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yulfasni, 2005, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.